

**ANALISIS BELANJA MODAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL DAN DANA ALOKASI UMUM DI PROVINSI ACEH**

***CAPITAL EXPENDITURES ANALYSIS, REGIONAL ORIGINAL INCOME, FUNDS FOR RESULTS AND FUNDS OF GENERAL ALLOCATION IN ACEH PROVINCE***

**Murtala<sup>1</sup> dan Irham Iskandar<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>)Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh

<sup>2</sup>)Peneliti Bappeda Aceh

E-Mail: tala.murtala@gmail.com

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Aceh. Penelitian ini memiliki rentang waktu 4 tahun, yaitu tahun 2006 sampai dengan 2009 dengan melihat laporan statistik keuangan pemerintah daerah (Laporan Realisasi APBK) yang menyajikan data mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Modal. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh. Belanja Modal di Provinsi Aceh sangat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh. Belanja Modal di Provinsi Aceh sangat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Secara parsial Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh. Belanja Modal di Provinsi Aceh sangat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh. Belanja Modal di Provinsi Aceh sangat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

**Kata Kunci :** Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum

***ABSTRACT***

*The purpose of this study was to determine the Effect of Regional Original Revenue, Revenue Sharing Funds and General Allocation Funds on Regency / City Capital Expenditures in Aceh Province. This study has a span of 4 years, from 2006 to 2009 by looking at the financial statements of the local government (APBK Realization Report) which presents data on Local Revenue (PAD), Revenue Sharing Funds (DBH), General Allocation Funds (DAU) and Capital Expenditures. The results showed simultaneously Regional Original Revenue, Revenue Sharing Funds and General Allocation Funds have a significant effect on Regency / City Capital Expenditures in Aceh Province. District / City Capital Expenditures in Aceh Province are strongly influenced by Local Revenue, Revenue Sharing Funds and General Allocation Funds. Partially Local Own Revenue, Revenue*

*Sharing Funds and General Allocation Funds have a significant effect on Regency / City Capital Expenditures in Aceh Province. District / City Capital Expenditures in Aceh Province are strongly influenced by Local Revenue, Revenue Sharing Funds and General Allocation Funds. Partially the Profit Sharing Funds have a significant effect on Regency / City Capital Expenditures in Aceh Province. District / City Capital Expenditures in Aceh Province are strongly influenced by Local Revenue, Revenue Sharing Funds and General Allocation Funds. Partially the General Allocation Fund has a significant effect on Regency / City Capital Expenditures in Aceh Province. District / City Capital Expenditures in Aceh Province are strongly influenced by Local Revenue, Revenue Sharing Funds and General Allocation Funds.*

**Keywords :** *Capital Expenditures, Local Own Revenues, Profit Sharing Funds and General Allocation Funds*

## **PENDAHULUAN**

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini menitikberatkan otonomi pada daerah kabupaten dan kota, dengan tujuan untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia berimplikasi pada perubahan dalam sistem pembuatan keputusan terkait dengan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran pemerintah daerah. Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumberdaya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan, dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah, bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif, terlebih dahulu menentukan arah kebijakan umum (AKU) dan prioritas anggaran sebagai *guidance* dalam pengalokasian sumberdaya dalam APBD.

Sebagai salah satu daerah yang diberi otonomi khusus oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001, proporsi pendapatan untuk DBH, khususnya sumber daya minyak dan gas 70%. Ketetapan ini melebihi otonomi biasa yang mengatur pembagian pendapatan provinsi hanya 15% dari minyak dan 35% dari gas. Namun demikian sumber lain harus digali untuk menambah pendapatan daerah seperti penerimaan dari pajak. Pajak merupakan bagian terpenting dari penerimaan pemerintah di samping penerimaan dari minyak bumi dan gas alam serta penerimaan negara bukan pajak.

Alokasi belanja modal ini sangat berkaitan dengan pelayanan publik karena dapat meningkatkan produktifitas perekonomian daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus sangat memperhatikan hal ini, karena semakin tinggi dana yang dialokasikan untuk belanja modal maka semakin tinggi juga tingkat produktifitas perekonomian di daerah. Adi (2006) menjelaskan bahwa tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan akan menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor, produktifitas masyarakat diharapkan semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Secara teori, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) mendefinisikan belanja modal adalah

pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapasitas aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual.

Peraturan Direktur Jendral bendaharawan Nomor PER 33/PB/2008 suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas; pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah; perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Pada pasal 53 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.

Lebih lanjut, dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 11, dijelaskan bahwa dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari: 1) Pajak Bumi dan Bangunan(PBB); 2) Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan 3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21. Dana bagi hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebesar 90% untuk daerah dengan rincian sebagai berikut : a) 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke

Rekening Kas Umum Daerah Provinsi; b) 64,8% untuk daerah yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah ; dan c) 9% untuk biaya pemungutan. Sedangkan 10% bagian pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbalan sebagai berikut : a) 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah ; dan b) 35% dibagikan sebagai insentif kepada daerah yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 1 ayat 21). DAU dialokasikan berdasarkan persentase pendapatan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungan DAU-nya ditetapkan sesuai Undang-undang.

Maulida (2007), meneliti tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah. Hasil penelitian menunjukkan : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap prediksi Belanja Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Walidi (2009), meneliti tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Perkapita, Belanja Modal sebagai Intervening Variabel (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Utara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Perkapita; Belanja

Modal berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Perkapita ; Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal; Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Perkapita; Belanja Modal merupakan Intervening Variabel dalam hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Pendapatan Perkapita.

Panggabean (2009), meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Toba Simosir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah; Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah; Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah; Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Alokasi belanja modal belum sepenuhnya dapat terlaksana bagi pemenuhan kebutuhan publik, karena pengelolaan belanja modal masih belum berorientasi kepada kepentingan publik, hal ini karena belanja modal ini sarat dengan kepentingan politis. Anggaran untuk belanja modal ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun adanya kepentingan politik dari lembaga legislative yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan permasalahan di masyarakat (Halim dan Abdullah,2006).

Novelti dalam penelitian ini adalah menggunakan variabel belanja modal sebagai variabel dependent dan menggunakan data time series. Dalam penelitian terdahulu analisis pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum dilihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara dalam penelitian saat ini di dilihat pengaruhnya terhadap belanja modal, kemudian dalam penelitian terdahulu banyak digunakan data panel.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini sangat menarik untuk dikaji.

## METODE

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007). Populasi yang akan digunakan didalam penelitian ini, dengan menggunakan *data pooling*, yaitu kombinasi antara data runtut waktu (*time series*) dan silang tempat (*cross section*). Dengan demikian populasi dalam penelitian ini adalah seluruh di Provinsi Aceh yang berjumlah 23 kabupaten kota terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota.

Mengingat sebagian pemerintah yang menjadi populasi dalam penelitian ini merupakan pemekaran yang belum menyajikan data sesuai dengan kebutuhan penelitian, dengan demikian populasi dalam penelitian ini berjumlah 20 . Penelitian ini memiliki rentang waktu 4 tahun, yaitu tahun 2006 sampai dengan 2009 dengan melihat laporan statistik keuangan pemerintah daerah (Laporan Realisasi APBK) yang menyajikan data mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Modal.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi APBK Tahun 2006 sampai dengan 2009. Dari laporan tersebut diperoleh data mengenai jumlah realisasi PAD, DBH, DAU dan Belanja Modal. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh.

Variabel independen yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Umum (DAU), serta satu variabel dependen yaitu Belanja Modal (BM), sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ )

Pendapatan Asli Daerah (PAD), adalah penerimaan Pemerintah Daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Skala yang dipergunakan adalah skala Rasio.

b. Dana Bagi Hasil ( $X_2$ )

Dana Bagi Hasil (DBH), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Skala yang dipergunakan adalah skala Rasio

c. Dana Alokasi Umum ( $X_3$ )

Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Skala yang dipergunakan adalah skala Rasio

d. Belanja Modal (Y)

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan

kualitas aset. Skala yang dipergunakan adalah skala Rasio.

Analisis data dilakukan dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Metode OLS dengan persamaan sebagai berikut :

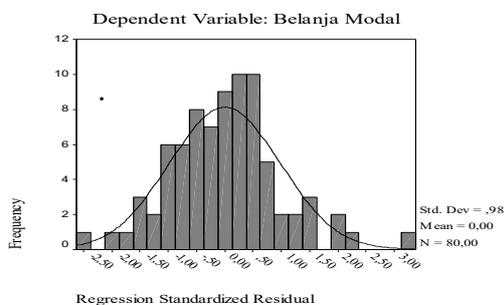
$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

- Y = Belanja Modal
- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta_1$  = Koefisien estimasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- $\beta_2$  = Koefisien Dana Bagi Hasil (DBH)
- $\beta_3$  = Koefisien Dana Alokasi Umum (DAU)
- $X_1$  = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- $X_2$  = Dana Bagi Hasil (DBH)
- $X_3$  = Dana Alokasi Umum (DAU)
- $\varepsilon$  = Error (variabel pengganggu)

### HASIL DAN PEMBAHASAN

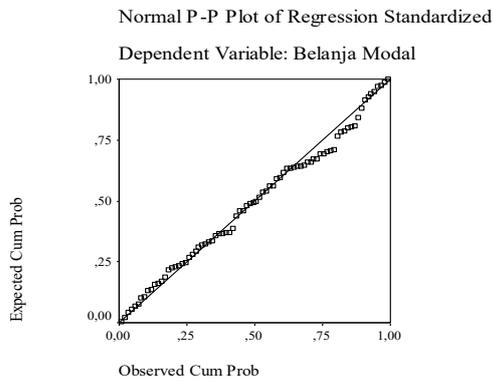
Uji normalitas pada penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel pengganggu atau residual pada model regresi berdistribusi normal. Uji-t dan uji-F mengasumsikan bahwa nilai residual harus mengikuti distribusi normal, dan apabila asumsi ini tidak terpenuhi maka penggunaan model regresi untuk prediksi menjadi tidak valid. Hasil pengujian normalitas data pada variabel PAD, DBH, DAU terhadap BM diperoleh hasil sebagai berikut:



Gambar 1. Histogram

Berdasarkan analisa lebih lanjut dengan menggunakan *Normal Probability*

*Plot of Regression Standardized Residual* dapat dilihat bahwa data residual membentuk pola garis lurus mengikuti garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data telah berdistribusi normal.



Gambar 2. Normal P-P Plot Model Regresi

Uji multikolinieritas bertujuan mendeteksi ada tidaknya hubungan antar variabel independen. Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *Varian Inflation Factor* (VIF) dari setiap variabel. Jika nilai VIF dari suatu variabel melebihi 10, dimana  $R^2$  melebihi 0,90 maka dikatakan berkolerasi sangat tinggi. Hasil pengujian multikolinieritas pada variabel PAD, DBH, DAU dan BD diperoleh sebagai berikut.

Tabel 1. Collinearity Statistics

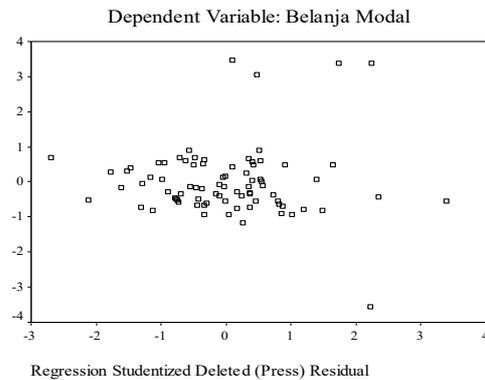
Model	t	Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2,337	0,022		
DBH	4,706	0,000	0,750	1,332
DAU	2,462	0,039	0,856	1,168
PAD	2,484	0,015	0,686	1,459

Sumber : Hasil Pengolahan Data, (data diolah, 2019)

Hasil pengujian untuk ketiga variabel bebas dalam penelitian ini memiliki nilai VIF dibawah 10 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gangguan multikolinieritas.

Di dalam penelitian ini, pengujian terhadap gejala autokorelasi dilakukan dengan uji “Durbin Watson” (D.W. Test). Dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi adalah jika  $DU < DW < 4 - DU$ . Dari hasil penelitian diperoleh nilai sebesar nilai  $DU = 1,78 < DW = 1,90 < 4 - DU = 2.1$  sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadinya gejala autokorelasi.

Grafik scatterplots pada Gambar 3 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu yang teratur, yang mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 3 Scatterplot

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan Belanja Modal dapat dilakukan dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, meningkatkan Dana Bagi Hasil dan dengan meningkatkan Dana Alokasi Umum.

Hasil temuan ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Pulau Jawa. Dipihak lain Maulida (2007), yang meneliti tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap prediksi Belanja Daerah. Sementara Halim dan Abdullah (2003) menyimpulkan bahwa sumber pendapatan daerah berupa dana perimbangan juga berpengaruh positif terhadap belanja modal

Syukri (2006) dalam penelitiannya dengan menggunakan model menunjukkan bahwa alokasi untuk belanja modal berasosiasi positif terhadap belanja pemeliharaan untuk konteks pemerintahan daerah di Indonesia setelah otonomi daerah dilaksanakan. Besaran belanja modal berasosiasi dengan pendapatan daerah yang bersumber dari pemerintah pusat, tapi tidak dengan pendapatan sendiri.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh. Hal ini mengunggulkan bahwa semakin tinggi penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka akan semakin tinggi Belanja Modal, hal ini sejalan dengan temuan yang dilakukan oleh Panggabean (2009), yang menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Pulau Jawa. Maulida (2007), juga mengatakan hal yang sama bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Daerah.

Dana Bagi Hasil secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh. Semakin tinggi Dana bagi Hasil maka akan semakin tinggi Belanja Modal di Provinsi Aceh. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Halim dan Abdullah (2003) menyimpulkan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal, sementara dipihak lain Sihite (2009) yang meneliti tentang Pengaruh Dana bagi Hasil, dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli daerah Terhadap Belanja langsung di kabupaten dan kota di Sumatra Utara menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Langsung.

Pemerintah akan memiliki kemampuan dalam menetapkan belanja langsung yang lebih besar apabila anggaran dana bagi hasil, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah semakin besar, begitu juga sebaiknya pemerintah akan menetapkan belanja langsung yang lebih kecil apabila anggaran dana bagi hasil, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah semakin kecil (Sihite, 2009).

Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh. Dengan Dana Alokasi Umum yang semakin besar maka akan semakin besar Belanja Modal begitu juga sebaliknya. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menyebutkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja modal. Kemudian Maulida (2007), dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum secara parsial juga berpengaruh signifikan dan positif terhadap prediksi Belanja Daerah. Ditambahkan lagi dengan pendapat Darwanto (2007) yang menyebutkan bahwa secara parsial dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja modal.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2006-2009 berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh. Hal ini mengidentifikasi bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka akan semakin besar alokasi untuk Belanja Modal di di Provinsi Aceh.
2. Dana Bagi Hasil dari tahun 2006-2009 berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh. Hal ini mengidentifikasi bahwa semakin besar Dana Bagi Hasil baik dari pajak maupun dari bagi hasil sumber daya alam maka akan semakin besar alokasi untuk Belanja Modal di di Provinsi Aceh.

3. Dana Alokasi Umum dari tahun 2006-2009 berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh. Hal ini mengidentifikasi bahwa semakin besar Dana Alokasi Umum maka akan semakin besar alokasi untuk Belanja Modal di di Provinsi Aceh.
4. Hasil penelitian juga menunjukkan secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh.

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan pada masyarakat dan pemerintah daerah, seperti: Pertama, meningkatkan alokasi belanja daerah maka pemerintah daerah diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah, demikian juga Pemerintah Daerah agar terus mengupayakan untuk bisa menarik Dana Alokasi Umum semaksimal mungkin; Kedua, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperbanyak sensus yang digunakan agar hasilnya lebih representatif terhadap populasi yang dipilih. dan mengambil sampel selain kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Aceh; Ketiga, variabel yang digunakan dalam penelitian akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan Pemerintah Daerah lainnya, maupun variabel non-keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro-ekonomi.

#### DAFTAR PUSTAKA

Halim, Abdul, Damayanti, Theresia, 2007, *Pengelolaan Keuangan Daerah, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN.

Halim, Abdul dan Syukri Abdullah. (2003). "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus di Jawa dan Bali". *Simposium Nasional Akuntansi VI*. Oktober.

-----,(2006). "Studi Atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan: Vol. 2, No.2*, 17-32. November.

-----, (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi.

Maulida, Novi Pratiwi. (2007). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah*, Yogyakarta: Tesis S2 UII.

Panggabean, Edison, Hendri H. (2009). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Toba Samosir, Medan*, Tesis Program Pascasarjana Ekonomi USU.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2009 tentang *Dana Alokasi*

-----, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah*.

-----, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

-----, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06 Tahun 2007 tentang *Bagan Akun Standar (BAS)*.

Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER 33/2008 Tentang *Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai,*

Belanja barang dan Belanja Modal sesuai dengan Permenkeu No 91./PMK. 05/ 2007 Tentang Bagan Akun Standar.

- Syukry Abdullah, (2006). Pengalokasian Belanja Fisik dalam Anggaran Pemerintah Daerah (Studi Empiris atas Determinan dan Konsekuensinya Terhadap Belanja Pemeliharaan). *Jurnal Akuntansi Keuangan*, Vol 3 No 4.
- Sihite, (2009). *Peningkatan Penerimaan Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Perencanaan Pembangunan. PT. Gia, Indonesia.
- Sugiyono. (2007). *Statistik untuk Penelitian*, Bandung, Alfabeta.
- Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal, 2008, *Grand Design*, Jakarta:Desentralisasi Fiskal Indonesia, Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Walidi. ( 2009). Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal sebagai Intervening Variabel (Studio Kasus di Propinsi Sumatera Utara), Medan, Tesis Program Pascasarjana Ekonomi USU.

